

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Didalam laporan keuangan, laba menjadi salah satu aspek penting didalamnya. Laba memiliki dampak terhadap pengambilan keputusan ekonomi yang menggambarkan nilai perusahaan dan menjadi alat dalam mengukur aktivitas kinerja perusahaan (Graham *et al.*, 2005). Laba yang tergambar dalam laporan keuangan secara tidak langsung dapat meningkatkan reaksi investor atas saham perusahaan yang beredar dengan harapan tingkat pengembalian yang naik seiring dengan peningkatan laba yang diperoleh. Akan tetapi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan sering kali tidak sebanding dengan nilai perusahaan yang sebenarnya. Adanya keterkaitan antara laporan keuangan dan pihak eksternal perusahaan, memungkinkan terciptanya motivasi bagi pihak manajemen perusahaan untuk mencapai ekspektasi laba, bahkan melebihi dari target yang ditentukan. Terpenuhinya ekspektasi dalam melaporkan laba rugi, melatarbelakangi aktivitas manajemen laba (Lo, 2008).

Pergeseran perilaku manajemen laba akrual ke manajemen laba riil bermula dari perubahan standar atau adopsi dari IFRS sejak tahun 2012. Di Indonesia sendiri, para manajer perusahaan cenderung menggunakan opsi manajemen laba akrual sebelum pegadopsian IFRS dan beralih ke opsi manajemen laba riil setelah pengadopsian IFRS. Manajemen laba riil memungkinkan adanya dampak langsung terhadap perubahan pendapatan pertahun, karena adanya hubungan erat dengan biaya-biaya dan pendapatan yang disajikan didalam laporan laba rugi. Apabila manajer melakukan manajemen laba yang bertujuan untuk menyembunyikan keadaan perusahaan yang sesungguhnya, hal ini tentu akan berdampak negatif, serta merugikan pihak pemegang saham atau pemangku kepentingan eksternal lainnya (Ipino & Parbonetti, 2017).

Laba riil sendiri dianggap sebagai perilaku menyimpang oleh para praktisi dari aktivitas bisnis yang normal dalam memenuhi target pendapatan yang diharapkan. Adanya aktivitas manajemen laba riil menjadi permasalahan bagi investor karena sulit untuk dideteksi, aktivitas tersebut sejatinya juga berdampak

langsung terhadap arus kas masa kini dan masa depan perusahaan (Graham *et al.*, 2005). Sedangkan jika dilihat dari sisi para akademisi, manajemen laba merupakan perilaku oportunistik pihak manajemen dalam mencapai laba maksimal yang ditentukan oleh beberapa prosedur maupun metode akuntansi yang mengacu pada PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Hal ini membuat perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih dasar suatu metode ataupun kebijakan dalam pencatatan maupun penyusunan laporan keuangan. Jadi, selama laporan keuangan tetap berpedoman kepada standar dan prinsip akuntansi serta menyertakan CALK, manajemen laba bukanlah tindak kecurangan dan masih diperbolehkan. Meskipun hal ini tidak melanggar standar akuntansi, manajemen laba riil dapat menyesatkan pihak luar yang menggunakan informasi laporan keuangan (Lo, 2008). Tindakan manajemen laba yang keluar dari pedoman dan prinsip akuntansi yang berlaku oleh pihak manajemen bisa disebut sebagai tindakan manajemen yang menyimpang.

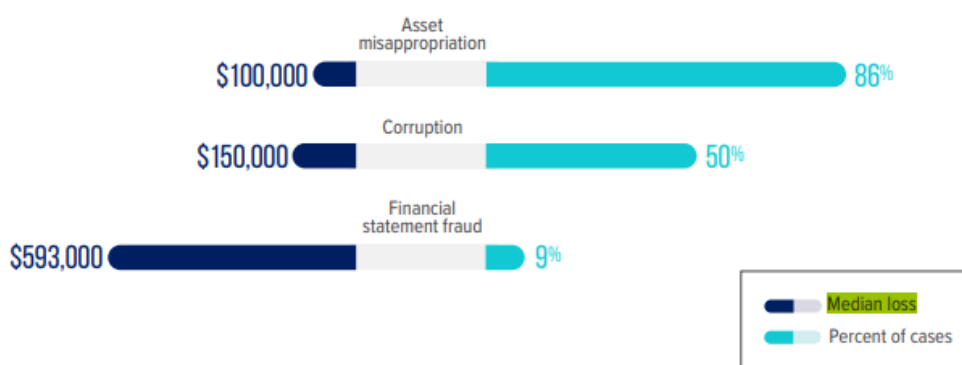
Dewasa kini, laporan keuangan menjadi salah satu sumber yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan informasi yang ada sehingga berdampak pada kerugian bagi para pengguna laporan. Tercatat telah banyak skandal keuangan di berbagai belahan dunia yang melibatkan laporan keuangan. Seperti investigasi yang dilakukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*) dalam *Report to The Nations* pada tahun 2022 yang mengungkapkan informasi mengenai hasil skema *fraud* yang berasal dari lebih dari 2.000 kasus penipuan nyata yang memengaruhi organisasi di 133 negara dan 23 industri.



Gambar 2 Investigasi Kasus Kecurangan di Berbagai Negara

Sumber : The 2022 Report to The Nations (ACFE)

Adanya kerugian dengan rata – rata sebesar \$ 1.783.000 untuk setiap kasus *fraud* yang terjadi pada perusahaan di berbagai negara menunjukkan bahwa kasus *fraud* adalah permasalahan global yang terjadi di setiap negara dan di setiap industri di seluruh belahan dunia. Pengukuran tingkat sebenarnya dari kasus *fraud* sendiri menjadi tantangan karena sifat penyembunyian dan penipuan yang melekat pada sebagian besar skema. ACFE juga mengestimasi bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar 5% dari total pendapatan untuk kasus kecurangan setiap tahunnya dengan total kerugian lebih dari \$ 4,7 triliun yang hilang karena penipuan secara global.



Gambar 3 Jumlah Kasus dan Kerugian Akibat Kecurangan di Seluruh Dunia

Sumber : The 2022 Report to The Nations (ACFE)

Hal menarik ditunjukkan pada skema diatas mengenai dampak dari kecurangan pada laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*). Skema penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*) merupakan skema paling umum terjadi dengan presentase sebesar 86% kasus dengan rata-rata kerugian sebesar US\$ 100,000. Kasus korupsi juga menjadi skema yang menyumbang presentase yang besar yakni sebesar 50% dengan kerugian yang ditimbulkan rata-rata sebesar \$150.000. Namun dua skema dari kasus *Asset Misappropriation* dan *Corruption* masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kecurangan pada laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*). Dengan rata-rata kerugian yang lebih tinggi yakni sebesar \$593.000, *Financial Statement Fraud* hanya menyumbang 9% kasus dari total kasus sebanyak 2.110 kasus yang terjadi selama tahun 2020 hingga tahun 2022 (ACFE, 2022). Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) sendiri merupakan tindakan manajemen suatu perusahaan guna memberikan informasi yang keliru mengenai laporan keuangan perusahaan kepada para penggunanya sehingga perlu adanya pencegahan sebelum kasus itu berdampak terhadap perusahaan.

Praktik manajemen laba merupakan isu klasik yang masih berlangsung hingga saat ini. Skandal mengenai aktivitas manajemen laba tidak terjadi hanya pada negara berkembang namun juga di negara maju sekalipun seperti di Amerika Serikat. Enron, Lucent, WorldCom, Tyco, dan Xerox merupakan perusahaan yang melakukan tindak kecurangan laporan keuangan dengan tujuan menguasai pasar agar mendapatkan peningkatan harga pasar yang terindeks pada pertumbuhan kinerja perusahaan antar periode (Bergstesser & Philippon, 2006). Hal ini dapat diketahui karena banyaknya dorongan dari media mengenai kebangkrutan yang melanda perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat.

Pada tahun 2015 lalu, terungkap kasus *fraudulent financial statements* pada Toshiba Corp yang melakukan pembohongan kepada pengguna laporan. Perusahaan yang menjadi salah satu perusahaan terbesar di Jepang ini terbukti telah melakukan kecurangan melalui *accounting fraud* sebesar 1.22 milyar dolar Amerika. Terbongkarnya kasus ini dimulai saat audit pihak ketiga melakukan investigasi internal terhadap laporan keuangan tahunan. Berdasarkan hasil investigasi diketahui bahwa manajemen Toshiba menetapkan target laba yang

tinggi ditengah krisis global yang melanda pada tahun 2008, sehingga saat target laba tersebut tidak tercapai, pihak manajemen melakukan aktivitas manajemen laba. Bercermin pada perusahaan raksasa di Jepang tersebut, kasus ini terjadi dikarenakan lemahnya tata kelola perusahaan khususnya pada pihak *board*. Hal ini terbukti dari hasil investigasi bahwa adanya permasalahan internal dimana Toshiba gagal dalam mendeteksi aktivitas yang dapat merugikan perusahaan.

Di Indonesia sendiri juga ditemui kasus pada perusahaan yang melakukan kecurangan atas penyajian laporan keuangan yang diimingi dengan aktivitas manajemen laba. Dilansir dari republika.co, PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) melakukan pengakuan pendapatan (*net income*) setelah sebelumnya mengalami kerugian. Dengan pengakuan laba bersih sebesar US\$ 809,85 ribu setelah periode sebelumnya mengalami kerugian sempat menimbulkan polemik. Kasus ini terkait piutang yang belum dibayar dan juga sejumlah diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan oleh PT Mahata Aero Teknologi terkait pemasangan *wifi*. Dengan dugaan adanya audit yang tidak sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi, kasus ini diperiksa kembali oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, efek dari kasus pelanggaran transparansi ini berdampak signifikan terhadap kepercayaan pemegang saham Garuda. Ditahun yang sama, PT Garuda Indonesia juga melakukan kasus penyeludupan yang melanggar etika dan aturan GCG. Dilansir dari kumparan.com, pada tahun 2019 lalu dalam konferensi pers Kementerian Keuangan dengan Kementerian BUMN menyampaikan bahwa komponen motor harley yang diseludupkan pada pesawat baru garuda Airbus A330-900 berkisar senilai 200 hingga 800 juta rupiah. Berdasarkan kasus tersebut, direktur utama PT Garuda Indonesia telah menyalahgunai jabatan hingga memanfaatkan peluang. Menteri BUMN menyatakan bahwa direktur PT Garuda Indonesia dinilai tidak menaati aturan *good corporate governance* yang wajib diterapkan oleh BUMN.

Kasus manajemen laba di Indonesia selanjutnya terjadi pada PT Lippo Karawaci Tbk. Dikutip dari Bisnis.com, diduga laporan keuangan PT Lippo Karawaci Tbk ditahun 2018 dengan proyek prestisius perseroan, yakni Meikarta mengindikasikan praktek suap atau terjadinya aktivitas manajemen laba oleh pihak manajemen Lippo Grup. Peningkatan drastis atas laba bersih tahun buku

2018 dengan lonjakan 135% lebih tinggi dibanding tahun buku sebelumnya, sempat menjadi isu miring bagi PT Lippo Karawaci Tbk. Dijelaskan bahwa didalam laporan keuangan tri semester pertama ditahun 2018, terdapat indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh para petinggi. Dekonsolidasi atas keuntungan proyek Meikarta oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) dinilai menjadi penyebab lonjakan laba periode berjalan yang diakui oleh PT Lippo Karawaci Tbk dengan keuntungan bersih senilai 1,3 triliun rupiah. Kasus ini berakhir dengan vonis 2 tahun penjara kepada mantan presiden direktur PT Lippo Cikarang atas suap yang diberikan kepada Bupati Bekasi dalam sejumlah perizinan pembangunan proyek Meikarta (bisnis.com).

Selain kasus *fraudulent financial statements*, kasus korupsi juga marak terjadi di Indonesia. Kasus penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan selanjutnya berasal dari PT Waskita Beton Precast dan PT Waskita Karya. PT Waskita Beton melakukan pengadaan fiktif dengan meminjam beberapa nama serta izin perusahaan lain untuk digunakan dalam aksi penyimpangannya (sindonews.com). Dalam kasus ini, perusahaan tersebut membuat surat pemesanan, surat jalan, dan tanda terima material fiktif serta meminjam bendera *vendor* atau *supplier*. Akibat dari kasus yang dilakukan oleh direktur operasional dan direktur pemasaran PT Waskita Beton sejak tahun 2016 hingga 2020 ini, negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp 2,5 triliun. Dilansir dari merdeka.com, bahwa beberapa subkontraktor fiktif yang mengerjakan proyek PT Waskita Karya dan beberapa petinggi PT Waskita Karya, PT Waskita Beton hingga petinggi dari Jasa Marga ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik KPK. Para pejabat dan mantan pejabat Waskita Karya tersebut terindikasi telah memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi terkait proyek fiktif yang dilakukan serta melibatkan perusahaan lain seperti PT Jasamarga.

Kasus-kasus yang diungkapkan oleh peneliti merupakan segelintir kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus yang bermula dari tingkat oportunistik manajemen untuk memaksimalkan pengungkapan laba, berakhir dengan sikap tidak etis yang melanggar berbagai macam prinsip dan pedoman akuntansi. Definisi awal mengenai manajemen laba yang merupakan sikap yang masih sesuai dengan pedoman, kini memiliki arti yang dekat dengan tindak kecurangan. Dari

sudut pandang penasihat investasi dan analisis kredit, praktik manajemen laba dalam setiap pola dan strategi standar akuntansi merupakan cerminan dari praktik korupsi yang termotivasi karena pikiran yang telah terdistrupsi oleh etiket korupsi (*corrupted mind*). Sehingga berdasarkan sudut pandang tersebut, aktivitas manajemen laba dilakukan secara sistematis berdasarkan motivasi dan kepentingan tertentu (Riduwan, 2020).

Manajemen laba merupakan praktik manajemen yang bernilai negatif bagi pemangku kepentingan di perusahaan, sehingga praktik tersebut harus dihindari (Riduwan, 2020). Hal tersebut dapat menyebabkan adanya konflik agensi antara pihak manajemen dengan pihak pemegang saham atas asimetri informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan. Untuk mengatasi konflik tersebut, teori agensi perlu diterapkan sebagai mekanisme pengawasan yang berguna dalam menyeimbangkan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham serta membatasi adanya perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Dalam aktivitas manajemen laba, *Corporate social responsibility* memainkan peran penting untuk mendeteksi aktivitas tersebut. CSR memiliki bentuk pengungkapan yang bersifat sukarela. Oleh karena itu sering kali terjadi kasus yang melanggar prinsip-prinsip CSR atau hanya sekadar pemenuhan pengungkapan untuk mendapatkan perhatian lebih dari pengguna laporan keuangan, sehingga dapat mendeteksi adanya aktivitas manajemen laba didalam perusahaan.

Kasus atas pelanggaran CSR salah satunya adalah kasus yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang. Dilansir dari Halmaherapost.com, petinggi perusahaan nikel PT Aneka Tambang (Antam) diminta oleh DPRD Maluku Utara untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan pesisir Halmahera Timur atas keterlibatannya dengan persoalan pencemaran lingkungan. Dikabarkan bahwa Desa Maba Pura di Halmahera Timur pada awal tahun 2021 lalu mengalami pencemaran air akibat aktivitas operasi PT Aneka Tambang site Maronopo. Pencemaran lumpur tambang ini bermula dari kegiatan penambangan nikel dan pembangunan tempat pemurnian (*smelter*) nikel oleh PT Aneka Tambang. Hal ini bukanlah kali pertama permasalahan lingkungan terjadi di Kota Maba, Maluku

Utara. Tercatat pada Jaringan Advokasi Rambang, aktivitas penambangan Antam di Maluku Utara sudah berlangsung sejak tahun 1979. Selama aktivitas penambangan tersebut menggeruk perut pulau, sejumlah kerusakan pun terjadi. Kasus lingkungan akibat aktivitas penambangan yang dilakukan PT Aneka Tambang ini juga terjadi di Jambi. Akibat adanya aktivitas operasional tersebut menyebabkan tercemarnya lima sungai besar di Jambi dan juga sekitarnya, bahkan juga memberikan dampak negatif kepada warga setempat dengan maraknya wabah yang disebabkan karena aktivitas penambangan PT Antam.

Aktivitas *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan perlu dipraktikkan serta diungkapkan dengan semestinya untuk memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan dan juga pengguna laporan keuangan. Adapun aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak terlepas dari *Triple Bottom Line* (Farha *et al.*, 2022). *Triple Bottom Line* yang bertujuan untuk menyeimbangkan aktivitas perusahaan dalam menjalankan bisnis dan juga memperhatikan kepentingan aspek-aspek *Profit, People, Planet* (Pradipta & Haiprajitno, 2015). Selain itu, diatur juga didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas, yakni mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukkan CSR sejalan dengan paradigma *Triple Bottom Line* dan juga telah diatur oleh pemerintah.

Teori legitimasi menjadi teori dasar dalam hubungan antara CSR terhadap manajemen laba. Perusahaan didorong untuk bertanggung jawab secara sosial dengan melaporkan laporan keuangannya secara transparan dan rendah. Teori legitimasi juga konsisten dengan perspektif jangka panjang bahwa perusahaan yang memelihara hubungan baik dengan pemangku kepentingan bekerja untuk kepentingan pengguna laporan.

Berbagai penelitian terdahulu telah menguji pengaruh atas CSR terhadap manajemen laba riil. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Boukattaya (2022) menunjukkan bahwa CSR dapat digunakan secara strategis oleh manajer untuk menyembunyikan praktik tidak etis, seperti aktivitas manajemen laba riil. Perusahaan dengan komitmen CSR yang tinggi lebih mungkin untuk tidak terlibat dalam kegiatan manajemen laba riil. Dengan demikian, CSR sejalan dengan

perspektif oportunistik yang menegaskan bahwa kegiatan CSR dimotivasi oleh insentif manajer untuk menyembunyikan pelanggaran etika, yaitu kegiatan manajemen laba riil. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Ghaleb *et al.* (2021) yang meneliti 475 sampel selama 2011 – 2016 di Yordania. Ghaleb sepakat bahwa CSR berkaitan dengan kegiatan REM yang lebih rendah pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Amman. Namun berbeda dengan penelitian Citrajaya & Ghozali (2020) yang menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi hasil pada hubungan CSR dan dimensi-dimensinya terhadap manajemen laba. Didalam penelitiannya, menyebutkan bahwa terdapat indikasi bahwa perusahaan non keuangan yang ada di Indonesia hanya menggunakan aktivitas CSR yang berkaitan dengan lingkungan saja untuk menjalin hubungan baik dengan *shareholders*, diluar dari itu, perusahaan tidak mengaplikasikan keseluruhan tata kelola dan kontribusi sosial yang baik.

Studi modern menunjukkan bahwa *corporate governance* yang baik dapat mengurangi manipulasi laba, dan dewan direksi merupakan mekanisme yang signifikan bagi *corporate governance* untuk membatasi atau mengurangi masalah agensi (Abdullah *et al.*, 2021). Hanas (2009) menyatakan bahwa *board* adalah kepala organisasi yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengontrol penggunaan sumber daya agar konsisten dengan tujuan yang ditetapkan untuk organisasi. *Board* yang dimaksud di Indonesia dalam kaitannya dengan suatu perusahaan adalah dewan komisaris dan direksi. Dewan komisaris dan direksi adalah pihak yang bertanggung jawab atas kekuatan pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Dewan direksi merupakan bagian dari pihak manajemen yang berpeluang untuk melakukan aktivitas manajemen laba. Hal ini dikarenakan dewan direksi memiliki tanggung jawab atas semua keputusan yang dibuat oleh manajemen perusahaan, misalnya keputusan yang gagal dalam meningkatkan keuntungan atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham, atau bahkan menyebabkan skandal keuangan yang dapat merusak reputasi baik perusahaan merupakan tanggung jawab yang dipegang oleh dewan direksi (Kapoor & Goel, 2017). Sehingga dewan direksi menjadi pihak yang memiliki peranan lebih besar atas terjadinya aktivitas manajemen laba riil dalam suatu perusahaan.

Dalam manajemen laba, *Board size* memainkan fungsi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas keputusan pengendalian dikarenakan *board size* dapat menyebabkan masalah komunikasi dan kolaborasi dalam internal perusahaan yang mengarah pada pengurangan kontrol manajemen puncak dan meningkatkan aktivitas manajemen laba (Sáenz-González & García-Meca, 2014).

Board size perusahaan yang besar dapat menyulitkan dewan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Oleh karena itu *Board size* yang lebih besar dinilai kurang efisien karena mengarah pada pelaporan keuangan yang lebih buruk dan tidak menciptakan nilai entitas yang baik. Dijelaskan dalam penelitian terdahulu bahwa *board size* dalam perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba (Kapoor & Goel, 2017). Hasil penelitian ini didukung juga oleh (Githaiga *et al.*, 2022) serta (Buerthey *et al.*, 2020). Namun di sisi lain Garven (2015) tidak mencatat adanya pengaruh *board size* pada kegiatan manajemen laba riil. Demikian juga, Gerged *et al.* (2021) yang gagal menunjukkan koneksi untuk *board size* dengan manajemen laba riil.

Banyak dari penelitian terdahulu yang sepakat bahwa didalam *board structure* diperlukan *board independence*. *Board independence* memiliki tugas dalam pemantauan dan memastikan bahwa semua keputusan diambil dapat mengutamakan kepentingan semua pihak dalam perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama dan menghindari perilaku oportunistik sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Abdullah *et al.*, 2021).

Board independence harus bekerja dan melaksanakan tanggung jawabnya secara independen. *Board independence* anggota direksi non eksekutif yang dinilai memiliki tingkat independen yang lebih tinggi terhadap area yang menimbulkan konflik kepentingan dalam. Hal ini menjelaskan, semakin tinggi proporsi *board independence* pada dewan direksi, maka akan semakin tinggi pencegahan atas manipulasi laba yaitu manajemen laba (Abdullah *et al.*, 2021). Hal ini juga didukung oleh Kapoor & Goel (2019) dan Abdullah *et al.* (2021) yang sepakat bahwa *board independence* dapat mendeteksi terjadinya manajemen laba riil. Namun terdapat perbedaan atas hasil penelitian yang dilakukan Garven (2015) yang menunjukkan tidak adanya keterkaitan antara *board independence* dengan manajemen laba riil.

Kegagalan perusahaan untuk memastikan keandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna laporan. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya celah dalam internal perusahaan sehingga memungkinkan munculnya aktivitas manajemen laba. Dalam mengurangi adanya resiko celah dalam internal perusahaan tersebut, maka diperlukannya struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Studi modern menunjukkan bahwa *corporate governance* yang baik dapat mengurangi manipulasi laba atas perilaku oportunistik manajer untuk mengambil keuntungan pribadi (Gerged *et al.*, 2021).

Mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan terhadap aktivitas manajemen. Komite audit memiliki peran dalam membantu dewan dalam melaksanakan tugas kontrolnya. Komite audit juga berperan sebagai alat pengendalian manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan, seperti pemberian informasi yang tidak akurat dan material. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit menyelenggarakan rapat atau koordinasi untuk menjalankan tugasnya secara efektif dalam hal pengawasan. Oleh karena itu, semakin sering komite audit mengadakan pertemuan, maka semakin baik komite audit dalam menjalankan tugasnya secara efisien dan optimal.

Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Song (2022) dan Gerged *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa komite audit mampu memberi efek moderasi secara signifikan terhadap hubungan tanggung jawab perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dengan manajemen laba, sehingga peran kepatuhan atas pengaruh komite audit dapat meningkatkan integritas laporan keuangan dan bertindak sebagai pencegah manipulasi dari aktivitas manajemen laba riil.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji faktor – faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba riil di Indonesia yakni *Corporate Social Responsibility* dan *board structure* yang diproaksikan dengan *board size* serta *board independence* dengan komite audit sebagai pemoderasi. Motivasi yang mendorong peneliti pada penelitian ini dikarenakan adanya fenomena-fenomena terkait praktik manajemen laba riil yang dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi diantara pemegang saham dengan manajer, karena kesenjangan dalam

penyaluran informasi yang dapat berujung pada kasus *fraud* yang bisa merugikan banyak pihak. Selain itu penulis tertarik atas penelitian terkait perilaku oportunistik yang kerap kali terjadi meskipun sistem tata kelola perusahaan sudah dilaksanakan, sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21/POJK.04/2015 yang menetapkan kewajiban mekanisme pengawasan bagi emiten di Indonesia yang dilakukan oleh penanggung jawab aktivitas harian perusahaan yakni dewan direksi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini *Corporate Social Responsibility* dan *board structure* pada emiten di Indonesia. Adapun kebaruan dari penelitian ini ialah ketertarikan untuk menggabungkan model penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan Dakhllalh *et al.* (2021) di Yordania dengan menggunakan proksi pengukuran yang berbeda atas *Board Structure* sesuai dengan peraturan di Indonesia serta menambahkan variabel independen CSR berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Boukattaya, 2022).

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang terjadi dan ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. **“Komite Audit Memoderasi Hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dan *Board Structure* terhadap Manajemen Laba Riil”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

- a Apakah CSR berpengaruh terhadap manajemen laba riil?
- b Apakah *board size* berpengaruh terhadap manajemen laba riil?
- c Apakah *board independence* berpengaruh terhadap manajemen laba riil?
- d Apakah komite audit dapat memoderasi hubungan antara CSR terhadap manajemen laba riil?
- e Apakah komite audit dapat memoderasi hubungan antara *board size* terhadap manajemen laba riil?
- f Apakah komite audit dapat memoderasi hubungan antara *board independence* terhadap manajemen laba riil?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a Untuk menguji secara empiris pengaruh CSR terhadap manajemen laba riil.
- b Untuk menguji secara empiris pengaruh *board size* terhadap manajemen laba riil.
- c Untuk menguji secara empiris pengaruh *board independence* terhadap manajemen laba riil.
- d Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit yang memoderasi hubungan antara CSR terhadap manajemen laba riil.
- e Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit yang memoderasi hubungan antara *board size* terhadap manajemen laba riil.
- f Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit yang memoderasi hubungan antara *board independence* terhadap manajemen laba riil.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

a. Aspek Teoritis

Secara teoritis diharapkan agar penelitian ini akan meningkatkan *body of knowledge* di bidang CSR dan *Board Structure*, khususnya dalam hal dampaknya terhadap Manajemen Laba Riil, yang diperkuat oleh peran penerapan moderasi komite audit serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber dan/atau referensi untuk penelitian sejenis.

b. Aspek praktis (guna laksana) :

1. Bagi Perusahaan LQ45

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 untuk dijadikan bahan

dan lebih memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan CSR serta *Board Structure* terhadap aktivitas Manajemen Laba Riil dengan moderasi dari komite audit

2. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman serta berkontribusi dalam pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya terutama perihal hubungan CSR dan *Board Structure* dengan manajemen laba riil.

3. Bagi Pemerintah

Mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif dari manajemen kinerja melalui berbagai faktor, terutama komite audit dan struktur dewan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi *board structure* untuk dipertimbangkan kembali saat penyusunan peraturan terkait yang diperlukan dalam melindungi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya.